



# RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN 2023-2026



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**  
Jalan Bandara Sanggu 73751 Buntok-Kalimantan Tengah



**Rencana Strategi Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2023-2026**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
Jl. Bandara Sanggu 73751 Buntok Kalimantan Tengah

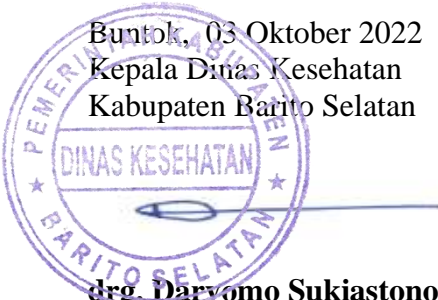
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini dapat disusun. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan dan bahan evaluasi program dan kegiatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan selama jangka waktu tertentu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Buntok, 03 Oktober 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Selatan



**drg. Daryomo Sukiastono, M.AP**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19650318 199103 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN .....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .....	7
2.2 Sumber Daya Kesehatan .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kesehatan .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ...	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	53
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	53
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
5.1 Strategis dan Kebijakan .....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP .....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Adapun tugas menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tersebut diperlukan adanya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memiliki tujuan dan fungsi untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka periode tertentu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan urusan kesehatan selama empat (4) tahun

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
2. Menjabarkan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan dalam



#### RPD Tahun 2023-2026

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan untuk mencapai target tujuan dan sasaran

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan UPT nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dan menjelaskan capaian-capaian indikator kinerja kesehatan penting dalam pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat perumusan dan penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, telaahan dan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

#### BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam angka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Barito Selatan,

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas

Kesehatan; dan

- d) Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
- 2) Subbag Umum dan Kepegawaian

### 3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
- 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

### 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Tugas pokok Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

#### 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Tugas Pokok Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan

kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

- c) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan
- 2) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri dari :

##### 1) UPT RSUD Jaraga Sasameh

UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan UPT
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

##### 2) UPT Puskesmas

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. UPT Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya
- c) Perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan
- d) Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan
- e) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
- f) Penggerakan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama pimpinan wilayah dan sector lain terkait
- g) Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap isnstitusi, jaringan pelayanan puskesmas dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
- h) Pelaksanaan pencatatan, pelaporan capaian dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan

UPT Puskesmas berjumlah 12 (dua belas) yakni :

- 1) UPT Puskesmas Jenamas
- 2) UPT Puskesmas Mengkatip
- 3) UPT Puskesmas Bangkuang
- 4) UPT Puskesmas Babai
- 5) UPT Puskesmas Baru
- 6) UPT Puskesmas Buntok
- 7) UPT Puskesmas Kalahien
- 8) UPT Puskesmas Sababilah
- 9) UPT Puskesmas Pendang
- 10) UPT Puskesmas Bantai Bambure
- 11) UPT Puskesmas Patas I
- 12) UPT Puskesmas Tabak Kanilan

- 3) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

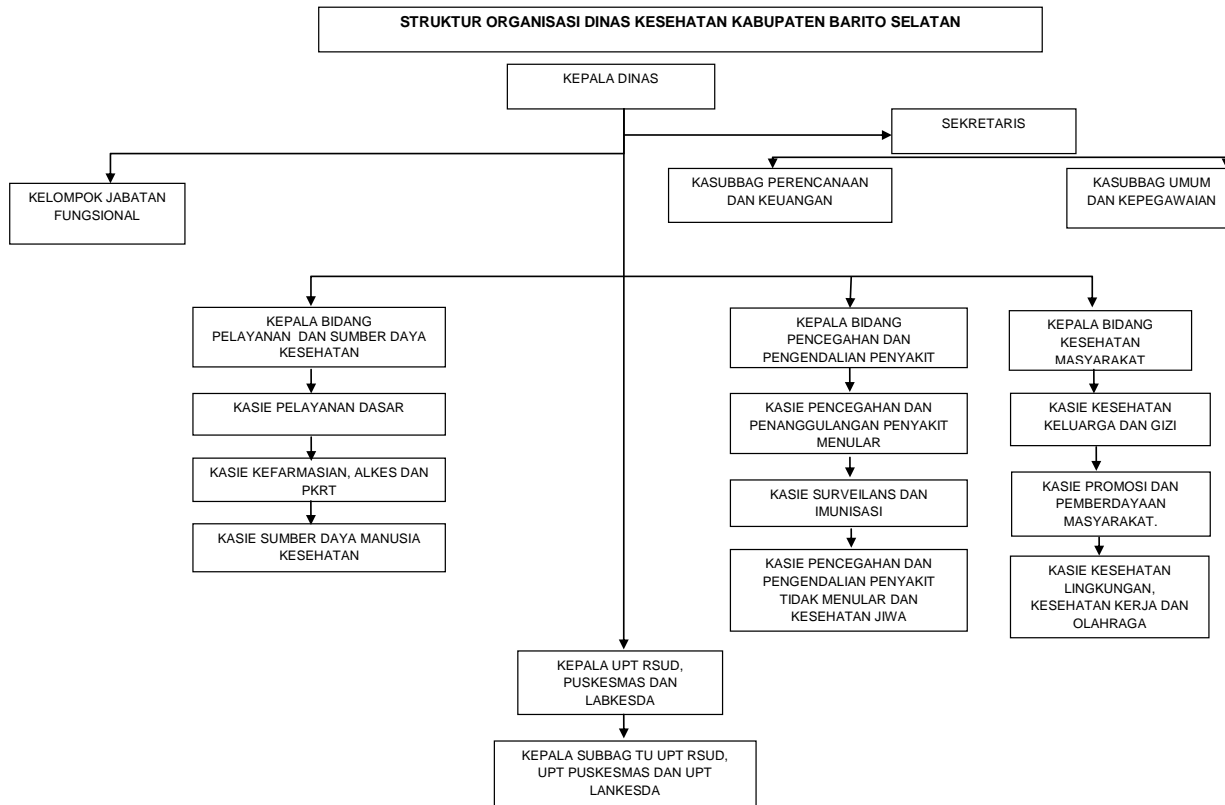


UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan laboratorium klinik,
- b) Penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
- c) Pengendalian pemeriksaan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia, patologi dan imunologi
- d) Pelayanan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- e) Penyelenggaraan kordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas
- f) Menyelenggarakan kepegawaian dan sumber daya manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
- g) Penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

### 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tahun 2021 berjumlah 633 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kekuatan SDM di Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	19
2	Sarjana S-1	239
3	Sarjana Muda (DIII) / (D/IV)	330
4	SLTA sederajat	45
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	663

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

**Tabel 2.2**  
**Kekuatan SDM di Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	582
3	Golongan II	34
4	Golongan I	0
	Jumlah	663

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan s/d Desember Tahun 2021**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit Pemerintah	1
2	Puskesmas Non Perawatan	7
3	Puskesmas Perawatan	5
4	Puskesmas Pembantu	57
5	Poskesdes + Polindes	77
6	Klinik/ Balai Pengobatan	4
7	Apotik	12
8	Toko Obat	9
9	Posyandu	173
7	Puskesmas Keliling	12

Sumber : Data Aset ,Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

### 2.2.3. Anggaran

#### a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Pemenuhan target pendapatan diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Secara rinci Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan**  
**Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021	
	Target (Rp)	Capaian (Rp)
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
1.1 Retribusi Daerah	365.984.250	
<b>2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>		
2.1 Pendapatan Bunga	65.000.000	
2.2 Pendaapatan dari pengembalian dana Non kapitasi	242.500.000	
2.3 Pendapatan BLUD RS. Jaraga Sesameh	35.797.150.647	
2.4 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	13.692.366.672	
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>50.163.001.569</b>	

**b. Belanja Daerah**

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Secara rinci realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Sealtan**  
**Tahun 2020 – 2021**

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58.531.735.334,10	48.668.938.947	83,15	57.513.573.082,71	52.662.464.234	91,5

B.	BELANJA LANGSUNG	117.034.142.541	92.346.624.097	78,91	114.301.303.982,99	105.288.749.670,3	92,12
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>175.565.877.875,10</b>	<b>141.015.563.044</b>	<b>80,32</b>	<b>171.814.877.065,7</b>	<b>157.951.213.904</b>	<b>91,93</b>

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan

Anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas, rata-rata realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Kinerja Pelayanan Kesehatan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa.

Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan jajaran kesehatan diseluruh Kabupaten Barito Selatan

#### 2.3.1 Gambaran Target dan Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2017 – 2021

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus menerus diupayakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Derajat kesehatan suatu wilayah dapat dilihat dari indikator utama kesehatan, seperti Angka Kematian Bayi

(AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR).

Berkaitan dengan permasalahan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan, maka RPJMD 2017 - 2021 secara gamblang menyebutkan beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini yaitu (i) disparitas status kesehatan; (ii) beban ganda penyakit; (iii) kinerja pelayanan kesehatan yang rendah; (iv) perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; (v) rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; (vi) rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; (vii) terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata; dan (viii) rendahnya status kesehatan penduduk miskin.

Tabel 2.6  
Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>											
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>										
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5	1	5	2,6	5	2,6	5	0	4	3,89
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	89	195	89	1	89	0	89	251	45	399,29
2.6.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 75	80	1 : 70	80	1 : 65	80	1 : 60	80	1:50	80
2.7.	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	10 : 100.000	10	10 : 100.000	10	10 : 100.000	10	10 : 100.000	10	10 : 100.000	10
2.8.	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	6 : 10.000	6	6 : 10.000	10	6 : 10.000	10	6 : 10.000	6	6 : 10.000	6
2.10.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	40 : 100.000	19,5	40 : 100.000	18,6	40 : 100.000	20,1	42 : 100.000	42,2	42 : 100.000	42,6
2.15.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	4%	0,03	4%	0,03	3,5%	0,01	3,5%	0,031	3%	0,019

2.39.	Cakupan Pelayanan Nifas	75%	64,1	78,50%	63,6	80%	82%	83%	82%	85%	62
-------	-------------------------	-----	------	--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Dari Tabel diatas dapat kita gambarkan capaian pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan indikator-indikator kesehatan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2021.

**a. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 Angka kematian bayi sebesar 3,89 per1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan kenaikan angka kematian bayi dari tahun 2017-2021. Akan tetapi Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu  $\leq 4$  per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100 % menunjukkan keberhasilan.

**Tabel2.7**  
**Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran**  
**Hidup Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup	1	2,6	2,6	0	3,89

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

**b. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup.**

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018-2019 angka kematian ibu sempat mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan, yakni ditahun 2021 sebesar 399 per100.000 kelahiran hidup. Hal ini



menunjukkan pada tahun 2021 kasus kematian pada ibu ialah berjumlah 9 orang. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu < 45 per 100.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya di akhir tahun 2021 belum mencapai 100%.

**Tabel 2.8**  
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran**  
**Hidup Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	195	1	0	251	399

*Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan*

### c. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata, yaitu posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan posyandu mandiri.

Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu

dihitung rasio ketersediaan posyandu balita kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Target rasio yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 1 per 75 balita dengan capaian yaitu 1 posyandu per 80 balita. Sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 1 posyandu per 50 balita dan capaian pada tahun 2021 adalah 1 posyandu per 63 balita, apabila dibandingkan dengan target maka capaian masih rendah dibawah target. Hal ini dikarenakan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 belum ada penambahan jumlah psoyandu di Kabupaten Barito Selatan dan pada tahun 2021 ada penambahan yang awalnya 160 posyandu menjadi 173 posyandu di Kabupaten Barito Selatan.

**Tabel 2.9**  
**Rasio Posyandu Persatuan Balita di Kabupaten**  
**Barito Selatan Tahun 2017-2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rasio Posyandu Persatuan Balita</b>	80	80	80	80	63

*Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan*

#### **5. Rasio puskesmas per satuan penduduk (%)**

Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Rasio Puskesmas per 10.000 penduduk pada tahun 2017 sebagai target awal RPJMD sebesar 10 puskesmas per 10.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 10 puskesmas per 10.000 penduduk dengan capaian yaitu 2.29 puskesmas per 30.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2017 capaian rasio puskesmas sebesar 10 Puskesmas per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2018 capaian rasio puskesmas sebesar 10 puskesmas per 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2019 capaian rasio puskesmas sebesar 10 puskesmas per 10.000 penduduk. dan pada tahun 2020 sebesar 10 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2021 sebesar 10 per 10.000 penduduk. Jadi rentang waktu antara 2017 sampai dengan 2021 capaian adalah sama yaitu 10 Puskesmas per 10.000 penduduk hal ini dikarenakan memang tidak ada penambahan jumlah puskesmas di tahun 2017 sampai dengan 2021.

#### **6. Rasio pustu per satuan penduduk (%)**

Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam

wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.

Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya.

Rasio Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada tahun 2016 sebagai target awal RPJMD sebesar 6 puskesmas pembantu per 1.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 6 puskesmas pembantu per 1.000 penduduk dengan capaian yaitu 6 puskesmas pembantu per 1.000 penduduk. dan seterusnya sampai dengan tahun 2021 capaian dan target ialah 6 puskesmas pembantu per 1.000 penduduk, hal ini dikarenakan memang tidak ada pembangunan puskesmas pembantu yang baru ditahun tersebut.

#### **7. Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)**

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.

Rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2016 sebagai target awal RPJMD sebesar 40 per 100.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk dengan capaian

sebesar 19,5 dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2018 target rasio dokter sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk dengan capaian 18,6 dokter per 100.000 penduduk, kemudian pada tahun 2019 target rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 40 dokter dengan capaian sebesar 20,1 dokter per 100.000 penduduk, pada tahun 2020 target rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 42 dokter dengan capaian 42,2 dokter per 100.000 penduduk. Dan terakhir tahun 2021 target rasio dokter sebesar 42 dokter per 100.000 penduduk dengan capaian 42,6 dokter per 100.000 penduduk.

#### **8. Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)**

Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. Ketika anak-anak kurang mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi, gizi buruk pun rentan mereka alami. Sayangnya, gizi buruk yang dialami anak bisa diperparah akibat kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi buruk dan cara menanganinya.

Prevalensi Gizi Buruk pada anak pada tahun 2016 sebagai target awal RPJMD sebesar 4 persen. Target penurunan persentase gizi buruk pada anak yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 4 persen dengan capaian sebesar 0,3 persen. Sedangkan pada tahun 2018 target penurunan persentase gizi buruk pada anak sebesar 4 persen dengan capaian sebesar 0,3 persen, kemudian target penurunan gizi buruk pada anak tahun 2019 dan 2020 sebesar 3,5 persen dengan capaian sebesar 0,1 persen dan 0,3 persen.

Sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 3 persen dengan capaian sebesar 0,19 persen.

### 9. Cakupan Pelayanan Nifas

Capaian pelayanan nifas pada ibu bersalin dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ialah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Persentase Pelayanan Nifas di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Persentase Pelayanan nifas	64,1%	63,6%	82%	76,4%	85%

*Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan nifas di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan capaian tersebut sudah memenuhi target tahun 2021 yaitu 85%.

### 2.3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2021 ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Predikat</b>
----------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Strategis			2020	2021	(%)	Kategori Kinerja
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin Berobat yang terlayani di Pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Cakupan pelayanan ibu nifas	85 %	76,4 %	85 %	100 %	Sangat Baik
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 45 Per 100.000 KH	251	389,2	11,56 %	Kurang
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	87 %	67,6 %	95 %	100 %	Sangat Baik
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000	≤ 4,5	0	2,9	100 %	Sangat Baik
	Prevalensi Balita Gizi Buruk Yang ditemukan dan ditangani (%)	0,3 %	0,03	0,019	100 %	Sangat Baik
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan	Persentase puskesmas yang Terakreditasi	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
Penyediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas dan RS	Tersedianya Tenaga Dokter Umum di Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
	Tersedianya Tenaga Dokter	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik

	Spesialis di RS					
Mewujudkan Lingkungan Sehat Masyarakat di	Persentase Kasus DBD Yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	75 %	70,6 %	75 %	100 %	Sangat Baik

Hasil analisis ke 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 adalah berikut :

**1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau**

**1) Cakupan Masyarakat miskin berobat yang terlayani di Fasilitas Kesehatan**

Masyarakat Miskin yang berobat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Pustu dan Poskesdes serta Rumah Sakit di Kabupaten Barito Selatan Pada tahun 2021 ialah sebanyak 18775 orang dan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 18775 orang sehingga capaiannya yakni sebesar 100%. Jumlah capaian tersebut ialah berdasarkan banyaknya kunjungan masyarakat miskin berobat dan dilayani di fasyankes, bukan berarti semua masyarakat miskin pada tahun 2021 semuanya pada sakit, akan tetapi data ini adalah kumulatif kunjungan pasien dengan status masyarakat miskin yang terlayani. Peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian target cakupan masyarakat miskin terlayani di fasilitas kesehatan ialah berupa adanya dukungan dana yang kegiatannya mendukung tercapainya target tersebut salah satunya ialah jaminan kesehatan untuk berobat atau mendapat pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan dengan menggunakan Kartu KIS sehingga masyarakat miskin dapat lebih mudah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tanpa memikirkan biaya yang mahal untuk berobat karena sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggaran



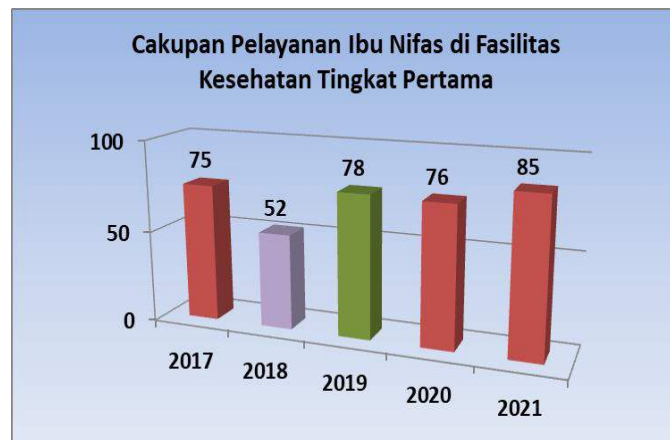
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

## **2) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada hari ke 29 s/d hari ke 42 setelah persalinan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 ialah sebanyak Jumlah 1938 orang (85%). Capaian ini sudah mencapai target Kabupaten Barito Selatan yaitu sebesar 85% dengan nilai realisasi kinerja sebesar 100 % dalam kategori predikat Sangat Baik.

Selanjutnya kecendrungan Cakupan pelayanan ibu nifas pada lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Fasilitas Kesehatan

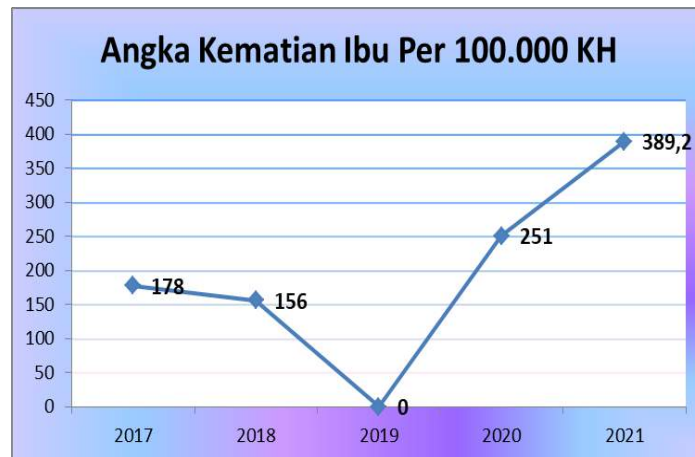


### 3) Cakupan Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu pada tahun 2021 ialah 8 (delapan) orang atau AKI sebesar 389,2 Per 100.000 Kelahiran Hidup, Pencapaian AKI pada tahun 2021 belum mencapai target kabupaten yaitu AKI sebesar 45 Per 100.000 Kelahiran Hidup (Jumlah Kematian 1 orang) dan apabila dibandingkan dengan target AKI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 175 Per 100.000 Kelahiran Hidup, Cakupan Kabupaten Barito Selatan masih belum memenuhi target. Realisasi kinerja pada cakupan AKI sebesar 100 % dalam kategori predikat kurang.

Selanjutnya kecenderungan Cakupan angka kematian Ibu pada lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Selatan



Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun dan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan.

Program di tahun yang akan datang akan difokuskan pada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta status ibu hamil dengan risiko tinggi kehamilan. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal *teamwork* yang solid serta *response time* yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencegah terjadinya kematian ibu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Persalinan
- b. Pendampingan Penelusuran Kasus Kematian Maternal
- c. Pelayanan Antenatal
- d. Pemberian PMT Bumil
- e. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
- f. Pemantauan bumi risiko tinggi

- g. Pelaksanaan kelas ibu dan Kemitraan bidan dukun
- h. Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out
- i. Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal
- j. Pembinaan pelayanan kesehatan ibu

#### 4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

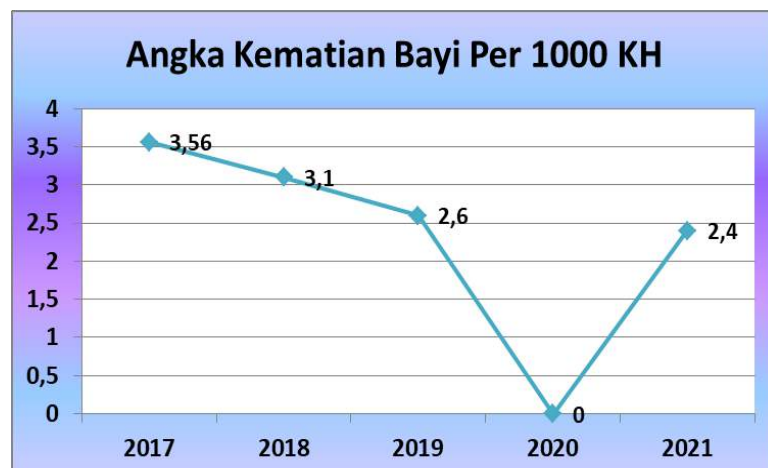
Capaian Pelayanan Kesehatan bayi pada tahun 2021 ialah sebesar 95 %, capaian ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 98 %. Pencapaian pada tahun 2021 sudah mencapai target kabupaten sebesar 85 % dengan realisasi capaian kinerja 100 % dalam kategori predikat **Sangat Baik**.

#### 5) Cakupan Angka Kematian Bayi

Pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 2,4 KH dari target Kabupaten sebesar 4,5/1000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 100 % termasuk kategori **sangat baik**. Pencapaian AKB pada tahun 2021 juga sudah mendapai target Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 24 Per 1000 Kelahiran Hidup. Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada lima tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut 3.4 berikut.

Gambar 3.4

Angka Kematian Bayi Tahun 2018 s.d 2020



Gambar diatas menunjukkan capaian Angka Kematian Bayi selama lima tahun terakhir yakni mengalami penurunan kematian secara signifikan selama periode 2017 s.d 2020 dan terdapat kasus kematian pada tahun 2021. Penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh BBLR, aspiksia, dan penyakit Kelainan Bawaan.

#### **6) Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi Balita Gizi buruk pada tahun 2021 sejumlah 0 orang atau persentase sebesar 0,00 % dari total balita 13050 orang. Pencapaian balita gizi buruk pada tahun ini sudah mencapai target Kabupaten yakni dibawah 4 persen dan sudah mencapai target provinsi Kalimantan Tengah sebesar 18,5 %.

Untuk Capaian Realisasi Kinerja yakni sebesar 100% dengan predikat kategori **Sangat Baik**.

### **Misi 2 : Penyediaan Fasilitas Kesehatan Yang Memadai**

#### **1) Persentase Puskesmas yang Terakreditasi**

Sampai dengan tahun 2021 jumlah Puskesmas yang terakreditasi ialah sebanyak 12 (Dua Belas) Puskesmas dengan persentase 100 % dengan kriteria Akreditasi Puskesmas yaitu kategori Akreditasi Dasar ada 8 (enam) dan Akreditasi Madya ada 4 (dua) dari total 12 Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan. Pencapaian Akreditasi Puskesmas sudah mencapai target Kabupaten Barito Selatan dan Realisasi Kinerja dengan predikat kategori **Sangat Baik (100%)**.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk pencapaian akreditasi Puskesmas ialah kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik diantaranya ialah :

1. Bimbingan Akreditasi/ Pendampingan Akreditasi Puskesmas
2. Workshop Akreditasi Puskesmas

### 3. Survei Akreditasi Puskesmas

#### **Misi 3 : Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan**

##### **) Tersedianya Tenaga Dokter Umum di Puskesmas**

Kondisi Ketenagaan Kesehatan khususnya tenaga dokter umum di Puskesmas pada tahun 2021 ialah berjumlah 30 orang. Sebagian Dokter yang ada di Kabupaten Barito Selatan berstatus PNS berjumlah 20 orang dan Non PNS berjumlah 10 orang (Kontrak daerah). Pencapaian ini sudah mencapai target kabupaten yaitu 12 orang dengan masing-masing puskesmas minimal 1 orang keterisian tenaga dokter umum karena semua puskesmas yang sudah memiliki dokter umum.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 terkait pemenuhan tenaga dokter umum di Puskesmas ialah melalui pengangkatan tenaga kontrak dokter dengan penganggaran berasal dari Pendapatan Asli Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dan melalui pengusulan Alokasi Perekrutan CPNS Daerah pada tahun 2021 melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

##### **2) Tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit**

Kondisi Ketenagaan dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah pada tahun 2021 ialah berjumlah 11 orang. Sebagian Dokter Spesialis yang ada di Kabupaten Barito Selatan berstatus PNS dan Non PNS (Kontrak daerah). Pencapaian ini sudah mencapai target kabupaten yaitu Minimal tersedia tenaga dokter spesialis dasar 8 orang, akan tetapi hal ini belum bisa mencerminkan kecukupan tenaga dokter spesialis karena mengingat untuk tenaga kontrak daerah ialah selama setahun dan belum tentu berlanjut.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pencapaian ini diantaranya ialah dengan pengangkatan dokter spesialis status tenaga kontrak dengan memberikan gaji

dan atau tambahan penghasilan tiap bulannya selama satu tahun.

#### **Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Upaya Kesehatan Yang Baik**

##### **1) Persentase Kasus DBD yang Tertangani**

Pada Tahun 2021 Pencapaian kasus DBD yang ditemukan ialah berjumlah 2 kasus dan semua kasus sudah tertangani. Pencapaian kasus DBD yang tertangani di Kabupaten Barito Selatan yaitu 100% dan pencapaian ini sesuai dengan target Kabupaten Barito Selatan yaitu 100% dan realisasi kinerja dengan capaian predikat kategori **Sangat Baik**.

Ada beberapa kegiatan terkait penanganan kasus DBD yaitu diantaranya ialah :

- a. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging, Kegiatan ini ialah salah satu upaya pencegahan dan penghentian vektor penyebab/pembawa penyakit DBD yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*.
- b. Peningkatan surveilans Epidemiologi dan dan Penanggulangan wabah, Kegiatan ini ialah kegiatan tanggap untuk pengawasan dan pengendalian wabah yang diakibatkan salah satunya ialah meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Barito Selatan.
- c. Pemeriksaan Jentik Nyamuk dan Pemberantasan sarang Nyamuk dengan menggalakan 3 M Plus di setiap keluarga oleh Petugas Puskesmas

##### **2) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Cakupan Rumah tinggal bersanitasi ialah jumlah capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Pada tahun 2021 capaian rumah tangga bersanitasi ialah sebesar 75,0 %, capaian ini sudah mencapai target Kabupaten Barito Selatan yaitu 75 % dengan predikat kategori **sangat baik (100%)**. Begitu juga dengan target dari Provinsi Kalimantan tengah tahun 2021 yaitu 70 % Capaian Kabupaten Barito

Selatan sudah sesuai target yang diharapkan.

### 2.3.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Selain indikator program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2021, indikator kesehatan lain tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Target Kementrian (%)	Keterangan
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4)	2332	1529	65,57	100	Belum Tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	2283	1960	85,85	100	Belum Tercapai
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2055	1954	95,09	100	Belum Tercapai
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	11134	5242	47,08	100	Belum Tercapai
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	3659	0	0	100	Belum Tercapai



	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
6	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12640	12640	100	100	Tercapai
7	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	4749	859	18,09	100	Belum Tercapai
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5101	5101	100	100	Tercapai
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	997	997	100	100	Tercapai
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	318	318	100	100	Tercapai
11	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	69	69	100	100	Tercapai
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	3286	11	0,33	100	Belum Tercapai

Sumber : Lampiran Profil Kesehatan Kabupaten 2021

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan**

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Kabupaten Barito Selatan adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan stunting, AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi. Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kabupaten Barito Selatan,

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki 12 (dua belas) Puskesmas, 52 (lima puluh dua) Pustu, 74 (tujuh puluh empat) Poskesdes, 1 (satu) Rumah Sakit Daerah yaitu RSUD Jaraga Sasameh dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Selain itu dalam 5 (tahun) ke depan akan direncanakan dan dianggarkan untuk pembangunan Ruang Pelayanan Stroke pada RSUD Jaraga Sasameh serta rehabilitasi Pustu dan Poskesdes serta pemenuhan alat kesehatan di Pustu maupun Poskesdes.

Adapun pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan ialah:

1. Memaksimalkan pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah

2. Pengembangan layanan di Rumah Sakit Jaraga Sasameh, berupa layanan khusus stroke dengan pembangunan ruangan serta pemenuhan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga dokter spesialis.
3. Memaksimalkan pelayanan kesehatan dasar pada Pustu dan Poskesdes di desa dengan Rencana rehabilitasi pustu maupun poskesdes serta pemenuhan alat kesehatan
4. Peningkatan status akreditasi naik tingkat pada yang ada di Kabupaten Barito Selatan
5. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai secara serempak di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelayanannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, JKN sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada saat pendaftaran secara online yang mengharuskan penggunaan provider internet. Aplikasi ini jelas memberikan manfaat bagi Puskesmas dalam menjalankan manajemen program dan manajemen pasien;
6. BPJS memberikan kapitasi kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di wilayah kerja Puskesmas. Besaran kapitasi yang diterima diperuntukan 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi Puskesmas untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Persiapan pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Tantangan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, UPT RSUD Jaraga Sasameh, UPT Puskesmas dan UPT labkesda, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil anailis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategik adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya minat dokter gigi untuk bertugas di Puskesmas, hal ini terlihat dari tidak adanya peserta seleksi CPNS tenaga dokter gigi pada tahun 2021 sehingga formasi yang ada tidak terisi,
- b. Sebagian besar puskesmas belum memiliki dokter gigi
- c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2022 terkait Penghapusan Tenaga Kontrak atau Tenaga Honorer yang mana di tahun 2023 Pemerintah Daerah sudah menetapkan solusi terkait Tenaga Kontrak yang ada di Daerah, seperti diketahui bahwa tenaga kontrak teknis seperti perawat, bidan dan tenaga administrasi sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan baik di Puskesmas, RSUD maupun di Dinas Kesehatan, dengan dihapuskannya tenaga kontrak/honorer maka akan berimbas kurang maksimalnya pelayanan di Tingkat dasar maupun rujukan.
- d. Kebutuhan anggaran yang besar untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- e. Semakin menurunnya alokasi anggaran pada kurun waktu dua tahun terakhir yang diberikan oleh Pusat seperti Kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik
- f. Masih adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di Indonesia secara umum dan di Kabupaten secara khusus baik itu kasus penyakit menular maupun tidak menular yang mana akan sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan baik dari segi perencanaan penganggaran maupun adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- g. Pola hidup masyarakat yang kurang baik seperti kebiasaan merokok di dalam rumah dan tempat tempat umum.

Sedangkan Peluang Dinas Kesehatan, UPT RSUD Jaraga Sasameh, UPT Puskesmas dan UPT labkesda, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil anailis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategik adalah sebagai berikut :

- a. Cukup lengkapnya pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Jaraga Sasameh dan adanya layanan khusus untuk pasien Stroke sehingga akan menarik minat masyarakat baik didalam daerah kabupaten maupun dari laur daerah
- b. Tersedianya Gedung pelayanan Poned di beberapa Puskesmas dan juga RSUD beserta alat kesehatannya
- c. Tersedianya peralatan kesehatan yang relatif lengkap dan berkualitas pada RSUD maupun Puskesmas
- d. RSUD dan Puskesmas melayani pasien dari asuransi kesehatan lainnya
- e. Adanya kerjasama antara Puskesmas ataupun RSUD dengan perusahaan Swasta dalam pengembangan pelayanan kesehatan
- f. Potensi pengembangan sarana masih sangat memungkinkan baik di Tingkat Puskesmas maupun RSUD
- g. Beroperasionalnya layanan lengkap pemeriksaan laboratorium kesehatan (labkesda) pada tahun yang akan dating melalui Pengajuan Raperda tarif layanan Labkesda.
- h. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan berbasis Aplikasi Online

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	1. Masih adanya kasus kematian pada bayi  2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu	Renstra 2017-2022  Renstra 2021-2022	1. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai  2. Rujukan belum optimal  3. Pembiayaan Kesehatan kurang  4. Policy/ Regulasi masih kurang	1. Belum semua Organisasi Profesi melaksanakan standar kompetensi bagi anggotanya  2. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan belum maksimal  3. Dukungan lintas sektor masih kurang	1. Mutu pelayanan kesehatan tidak memenuhi standar  2. Sistem Rujukan belum optimal

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. Koordinasi lintas program belum terpadu	4. Dukungan lintas sektor masih kurang	
	Masih adanya balita gizi buruk dan <i>stunting</i>	Renstra 2017- 2022	1. Fasilitas / Sarana prasarana 2. Sistem Rujukan 3. Pembiayaan Kesehatan 4. Regulasi 5. Dukungan lintas program	1. Ketersediaan Pangan 2. Pengetahuan masyarakat 3. Dukungan Lintas Sektor 4. Kemiskinan	1. Asupan gizi yang rendah 2. Adanya penyakit infeksi
	Masih tingginya penyakit menular, tidak menular dan bencana	Renstra 2017-2022	1. SDM Program masih belum 2. memadai dan 3. kompeten 4. Pembiayaan Program belum memadai 5. Logistik Program kurang 6. Ketersediaan alat diagnosis dan terapi masing kurang 7. Standar Petunjuk teknis 8. Fasilitas pelayanan kesesehatan 9. Sistem Rujukan 10. Belum semua didukung Regulasi	1. Perubahan iklim 2. Gaya hidup 3. Perubahan Virulensi agen penyakit 4. Pola resistansi agen penyakit 5. Regulasi 6. Dukungan lintas sektor 7. Lingkungan tidak sehat 8. Kemudahan Transportasi 9. Migrasi penduduk 10. Tingkat pengetahuan masyarakat 11. Komitmen Organisasi profesi masih kurang mendukung	1. Pergantian petugas program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru 2. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program 3. Perubahan iklim yang memengaruhi virulensi agen 4. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu 5. Ketersediaan logistik program

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan;
2. Jumlah, distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan masih kurang
3. Sarana kesehatan yang kondisinya kurang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar
4. Mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi standar
5. Akses layanan yang terhambat karena kemampuan masyarakat yang terbatas
6. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih kurang
7. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program serta pihak swasta belum optimal
8. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan belum optimal
9. Masih banyaknya ibu hamil yang melahirkan dirumah dan ditolong oleh tenaga dukun.
10. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
11. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melahirkan pada sarana kesehatan atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengurangi resiko melahirkan

Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan.



Tabel 3.3

## Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1. <i>SDG's (Sustainable Development Goals)</i> 2. <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> 3. <i>Global Warming (Pemanasan Global)</i> 4. <i>MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)</i> 5. <i>Hak Azazi Manusia (HAM)</i> 6. <i>Tobacco Control (FTCT)</i> 7. <i>Pandemi Covid-19</i>	1. Otonomi Daerah 2. Regulasi Kementerian kesehatan belum semua mendukung Daerah 3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat 4. Kebijakan JKN 5. Indikator SDGS yang berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang masih <i>off track</i> 6. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok 7. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial Pengarusutamaan Gender 8. <i>Pandemi Covid-19</i>	1. Semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan dan tidak Kompeten 2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan 3. Perijinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung.	

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJPD 2006-2026**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 yaitu: “Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 12 misi pembangunan meliputi:

1. Asri dan Lestari.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi diluar Sektor Pertanian.
4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Barito Selatan.
5. Mengembangkan kondisi sosial dan politik yang demokratis, saling tenggang rasa, persatuan dan aman.
6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial.
7. Beriman dan Bertaqwa.
8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi.
9. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman.
10. Mencegah Bencana Alam.
11. Peningkatan Profesionalisme pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa : “Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.” Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu
2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyesuaikan dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sasaran Strategi pembangunan kesehatan sesuai renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan mutu pelayanan kesehatan
2. Terpenuhinya Cakupan PBI Tepat Sasaran dan Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal
4. Meningkatnya status gizi balita
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sector
7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
8. Meningkatnya pengelolaan pengendalian & kedaruratan kesehatan masyarakat
9. Meningkatnya akses, kemandirian & mutu kefarmasian & alat kesehatan
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan pemerintah
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan
14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan. Dalam periode Renstra 2021-2026 dimana indikator yang digunakanlah adalah indikator Standar Pelayanan Minimal dan dari hasil evaluasi masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target.

Adapun untuk Sasaran strategis renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
6. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai SKPD Tehnis bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Demikian pula untuk kebijakan Provinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat dan Provinsi.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang berkelanjutan, ditetapkan arahan penataan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Dimana tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi

penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Implikasi RTRW menjadi pedoman dalam pembangunan dan rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPD. Secara khusus implikasi RTRW di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa permasalahan dan isu strategis dalam KLHS sedikit banyak juga memberikan implikasi pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Kebijakan pola ruang dan struktur ruang RTRW, isu strategis KLHS serta rekomendasi yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Hasil RTRW/KLHS Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	RTRW : Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan strategi mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung	Melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.	Pengembangan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kesehatan	Kebijakan dan strategi RTRW dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya memberikan dampak positif bagi bidang kesehatan dalam mengurangi dampak akibat bencana sehingga menjadi faktor pendorong
1	KLHS : Penurunan angka kematian ibu, bayi dan	Pembangunan kesehatan belum berwawasan	Lemahnya Koordinasi dengan sektor terkait	Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan

	balita dengan upaya promotif dan preventif	lingkungan	lingkungan	adalah pembangunan berwawasan kesehatan
2	Mencapai cakupan Kesehatan universal	Belum ada pemetaan terhadap akses pelayanan dasar bagi daerah yang sulit terjangkau pelayanan kesehatan	Daerah yang terisolasi akses pada pelayanan kesehatan	Kebutuhan akan pelayanan kesehatan mendapat prioritas dan jaminan dari Provinsi
3	mengakhiri kasus tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Terbatasnya pengetahuan SDM Kesehatan dalam penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di FKTP	Kemampuan Di tingkat kabupaten untuk melaksanakan pelatihan masih kurang	Pelaksanaan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh provinsi di Bapelkes.
4	Peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan asupan gizi masyarakat	Terbatasnya pengetahuan SDM Kesehatan dalam penanganan kasus gizi kurang pada balita dan Kasus KEK pada ibu hamil di FKTP	Lemahnya Koordinasi dengan sektor terkait penanganan Gizi masyarakat	Anggaran kesehatan dari Pusat untuk penanganan gizi di masyarakat

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun tertentu karena memiliki dampak yang signifikan bagi

daerah dan masyarakat. Adapun berdasarkan hasil telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS), maka isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19
2. Prevalensi penyakit menular utama (TB, ISPA) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat
3. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menurut standar SDGs
4. Masih adanya kasus kematian pada bayi
5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi (stunting)
6. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga dikarenakan tenaga kesehatan hanya terkonsentrasi di pusat kota.
7. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat – UKBM-PHBS
9. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
10. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan
11. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan
12. Masih terbatasnya regulasi kesehatan, kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
13. Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan dan minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi kesehatan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perumusan tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2006-2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun beberapa kedepan (2023-2026).

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPKPD) 2006-2026**

##### **4.1.1. Perumusan Tujuan**

Tujuan Dinas kesehatan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 ialah “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia. Tujuan Dinas Kesehatan pada Restra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Bidang Kesehatan yang akuntanbel

##### **4.2.2. Perumusan Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan.

Sasaaran Dinas Kesehatan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,
2. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi PD

Indikator Pembangunan Daerah yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023-2026  
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun				Kondisi Akhir (2026)
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,40	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (Lima) tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>Tujuan RPD 2023-2026</b>	:	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		
<b>Sasaran RPD 2023-2026</b>	:	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan		
<b>Tujuan PD 2023-2026</b>		<b>Sasaran PD 2023-2026</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Bidang Kesehatan yang akuntabel	1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3. Pemenuhan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. 4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Kabupaten 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Kabupaten 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 4. Penerbitan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten (Dokter Spesialis dan Sub Spesialis) 6. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten 7. Penerbitan Izin Toko
	2	Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat		

				<p>Obat, Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>8. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>9. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>10. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten</p> <p>11. Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten</p> <p>12. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten</p>
	3	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi PD	1. Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	<p>1. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas kesehatan</p> <p>2. Pelaksanaan Administrasi keuangan, BMD, Kepegawaian dan umum, penyediaan jasa dan pemeliharaan BMD</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan beserta UPT tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi rutin kantor di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Adapun indikator kinerja program ini adalah Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD

#### 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatannya yaitu :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Kegiatannya yaitu :
  - 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 2) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman  
Kegiatannya yaitu :
  - 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
  - 4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berikut adalah rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Bidang Kesehatan yang akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi PD	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	121.423.281.368	100 Persen	116.453.281.368	100 Persen	116.453.281.368	100 Persen	116.453.281.368	100 Persen	116.453.281.368	Persen	-	Persen	-	Persen	465.813.125.473				
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan Capaian Perangkat Daerah	5.390.000.000	100 Persen	420.000.000	100 Persen	420.000.000	100 Persen	420.000.000	100 Persen	420.000.000	100 Persen	420.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.680.000.000		
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	480.000.000		
		1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	300.000.000		
		1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	120.000.000		
		1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	200.000.000		
		1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	80.000.000		
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	240.000.000		
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	260.000.000		
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.802.306.054	100 Persen	66.802.306.054	100 Persen	66.802.306.054	100 Persen	66.802.306.054	100 Persen	66.802.306.054	100 Persen	66.802.306.054	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	267.209.224.216		
						100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen					
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.519.741.554	663 Orang	66.519.741.554	663 Orang	66.519.741.554	663 Orang	66.519.741.554	663 Orang	66.519.741.554	663 Orang	66.519.741.554	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	266.078.966.216		
		1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.874.000	1 Dokumen	174.874.000	1 Dokumen	174.874.000	1 Dokumen	174.874.000	1 Dokumen	174.874.000	1 Dokumen	174.874.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	699.496.000		
		1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.991.500	1 Dokumen	29.991.500	1 Dokumen	29.991.500	1 Dokumen	29.991.500	1 Dokumen	29.991.500	1 Dokumen	29.991.500	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	119.966.000		
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	100.000.000		
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	52.699.000	1 Dokumen	52.699.000	1 Dokumen	52.699.000	1 Dokumen	52.699.000	1 Dokumen	52.699.000	1 Dokumen	52.699.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	210.796.000				
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	280.000.000	100 Persen	280.000.000	100 Persen	280.000.000	100 Persen	280.000.000	100 Persen	280.000.000	100 Persen	280.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.120.000.000				
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	280.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	1.120.000.000				
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	235.529.477	100 Persen	235.529.477	100 Persen	235.529.477	100 Persen	235.529.477	100 Persen	235.529.477	100 Persen	235.529.477	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	942.117.909				

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, Kegiatan dan S u (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab (21)	Lokasi (22)
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0		target	Rp		
						target (7)	Rp (8)	target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)	target (13)	Rp (14)	target (15)	Rp (16)	target (17)	Rp (18)	target (19)	Rp (20)		
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65.226.477	1 Paket	65.226.477	1 Paket	65.226.477	1 Paket	65.226.477	1 Paket	65.226.477	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	260.905.909		
		1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	144.983.000	1 Dokumen	144.983.000	1 Dokumen	144.983.000	1 Dokumen	144.983.000	1 Dokumen	144.983.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	579.932.000		
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25.320.000	4 Orang	25.320.000	4 Orang	25.320.000	4 Orang	25.320.000	4 Orang	25.320.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	101.280.000		
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	388.655.800	100 Persen	388.655.800	100 Persen	388.655.800	100 Persen	388.655.800	100 Persen	388.655.800	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.554.623.200		
	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 Persen		100 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen							
	Persentase Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 Persen		100 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen							
	Persentase Capaian Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100 Persen		100 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen							
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.956.400	1 Paket	6.956.400	1 Paket	6.956.400	1 Paket	6.956.400	1 Paket	6.956.400	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	27.825.600		
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69.968.400	1 Paket	69.968.400	1 Paket	69.968.400	1 Paket	69.968.400	1 Paket	69.968.400	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	279.873.600		
		1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	24.000.000		
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.999.000	1 Paket	29.999.000	1 Paket	29.999.000	1 Paket	29.999.000	1 Paket	29.999.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	119.996.000		
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.998.000	10 Dokumen	4.998.000	10 Dokumen	4.998.000	10 Dokumen	4.998.000	10 Dokumen	4.998.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	19.992.000		
		1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu, dan Makan minum pegawai	29.990.000	12 Bulan	29.990.000	12 Bulan	29.990.000	12 Bulan	29.990.000	12 Bulan	29.990.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	119.960.000		
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.744.000	25 Laporan	240.744.000	25 Laporan	240.744.000	25 Laporan	240.744.000	25 Laporan	240.744.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	962.976.000		
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	480.000.000		
		1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Lainnya yang disediakan	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	480.000.000		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10.691.510.577	100 Laporan	10.691.510.577	100 Laporan	10.691.510.577	100 Laporan	10.691.510.577	100 Laporan	10.691.510.577	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	42.766.042.308		
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.952.000	1 Laporan	5.952.000	1 Laporan	5.952.000	1 Laporan	5.952.000	1 Laporan	5.952.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	23.808.000		
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	294.998.577	12 Laporan	294.998.577	12 Laporan	294.998.577	12 Laporan	294.998.577	12 Laporan	294.998.577	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	1.179.994.308		
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10.390.560.000	12 Bulan	10.390.560.000	12 Bulan	10.390.560.000	12 Bulan	10.390.560.000	12 Bulan	10.390.560.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	41.562.240.000		
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	165.000.000	100 Persen	165.000.000	100 Persen	165.000.000	100 Persen	165.000.000	100 Persen	165.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	660.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	120.000.000		
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	60.000.000		
		1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana / Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	480.000.000		
		<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</b>	<b>37.350.279.460</b>	<b>2 Persen</b>	<b>37.350.279.460</b>	<b>2 Persen</b>	<b>37.350.279.460</b>	<b>2 Persen</b>	<b>37.350.279.460</b>	<b>2 Persen</b>	<b>37.350.279.460</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>149.401.117.840</b>		
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang BLUD	37.350.279.460	12 Dokumen	37.350.279.460	12 Dokumen	37.350.279.460	12 Dokumen	37.350.279.460	12 Dokumen	37.350.279.460	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	149.401.117.840		
		<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase capaian layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>135.940.129.287</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.587.769.287</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.587.769.287</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.587.769.287</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.587.769.287</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>222.351.077.147</b>		
		<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Unit Pelaksana yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>27.142.781.750</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.142.781.750</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.142.781.750</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.142.781.750</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.142.781.750</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>108.571.127.000</b>		
				<b>Persentase Ketersediaan 80% Obat esensial di Puskesmas</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>0 Persen</b>		<b>0 Persen</b>		<b>0 Persen</b>			
		1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun dan Atau di Rehabilitasi	467.999.750	1 Unit	467.999.750	1 Unit	467.999.750	1 Unit	467.999.750	1 Unit	467.999.750	0 Unit	-	0 Unit	-	4.00 Unit	1.871.999.000		
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	6.059.616.000	1 Unit	6.059.616.000	1 Unit	6.059.616.000	1 Unit	6.059.616.000	1 Unit	6.059.616.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	24.238.464.000		
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10.786.957.000	2 Unit	10.786.957.000	2 Unit	10.786.957.000	3 Unit	10.786.957.000	3 Unit	10.786.957.000	0 Unit	-	0 Unit	-	10.00 Unit	43.147.828.000		
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	749.997.000	2 Unit	749.997.000	2 Unit	749.997.000	2 Unit	749.997.000	2 Unit	749.997.000	0 Unit	-	0 Unit	-	8.00 Unit	2.999.988.000		
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	4.00 Unit	2.600.000.000		
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4.011.251.000	3 Paket	4.011.251.000	3 Paket	4.011.251.000	3 Paket	4.011.251.000	3 Paket	4.011.251.000	0 Paket	-	0 Paket	-	12.00 Paket	16.045.004.000		
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1.856.822.750	1 Paket	1.856.822.750	1 Paket	1.856.822.750	1 Paket	1.856.822.750	1 Paket	1.856.822.750	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	7.427.291.000		
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2.326.596.250	1 Paket	2.326.596.250	1 Paket	2.326.596.250	1 Paket	2.326.596.250	1 Paket	2.326.596.250	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	9.306.385.000		
		1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	233.542.000	1 Paket	233.542.000	1 Paket	233.542.000	1 Paket	233.542.000	1 Paket	233.542.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	934.168.000		
		<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan</b>	<b>108.172.741.387</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.820.381.387</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.820.381.387</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.820.381.387</b>	<b>100 Persen</b>	<b>27.820.381.387</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>-</b>	<b>0 Persen</b>	<b>111.281.525.547</b>		
				<b>Persentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt; 24 jam</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>100 Persen</b>		<b>0 Persen</b>		<b>0 Persen</b>		<b>0 Persen</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				<b>Persentase Penurunan Stunting pada Balita</b>		<b>16</b>		<b>14</b>		<b>13</b>		<b>10</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.565.915.633	100 Persen	1.565.915.633	100 Persen	1.565.915.633	100 Persen	1.565.915.633	100 Persen	1.565.915.633	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	6.263.662.532		
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	746.558.333	100 Persen	746.558.333	100 Persen	746.558.333	100 Persen	746.558.333	100 Persen	746.558.333	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	2.986.233.332		
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	487.813.333	100 Persen	487.813.333	100 Persen	487.813.333	100 Persen	487.813.333	100 Persen	487.813.333	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.951.253.332		
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0- 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.320.445.333	100 Persen	1.320.445.333	100 Persen	1.320.445.333	100 Persen	1.320.445.333	100 Persen	1.320.445.333	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	5.281.781.332		
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	527.813.333	100 Persen	527.813.333	100 Persen	527.813.333	100 Persen	527.813.333	100 Persen	527.813.333	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	2.111.253.332		
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	512.813.333	100 Persen	512.813.333	100 Persen	512.813.333	100 Persen	512.813.333	100 Persen	512.813.333	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	2.051.253.332		
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	524.831.850	100 Persen	524.831.850	100 Persen	524.831.850	100 Persen	524.831.850	100 Persen	524.831.850	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	2.099.327.400		
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.954.857.144		
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	100 Persen	488.714.286	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.954.857.144		
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	388.714.286	100 Persen	388.714.286	100 Persen	388.714.286	100 Persen	388.714.286	100 Persen	388.714.286	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.554.857.144		
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	408.714.286	100 Persen	408.714.286	100 Persen	408.714.286	100 Persen	408.714.286	100 Persen	408.714.286	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	1.634.857.144		
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	243.714.286	100 Persen	243.714.286	100 Persen	243.714.286	100 Persen	243.714.286	100 Persen	243.714.286	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	974.857.144		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	2.027.269.400	1 Dokumen	2.027.269.400	1 Dokumen	2.027.269.400	1 Dokumen	2.027.269.400	1 Dokumen	2.027.269.400	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	8.109.077.600		
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	84.701.250	1 Dokumen	84.701.250	1 Dokumen	84.701.250	1 Dokumen	84.701.250	1 Dokumen	84.701.250	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	338.805.000		
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.495.193.060	1 Dokumen	1.495.193.060	1 Dokumen	1.495.193.060	1 Dokumen	1.495.193.060	1 Dokumen	1.495.193.060	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	5.980.772.240		
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	414.573.667	1 Dokumen	414.573.667	1 Dokumen	414.573.667	1 Dokumen	414.573.667	1 Dokumen	414.573.667	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.658.294.668		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.147.447.000	1 Dokumen	1.147.447.000	1 Dokumen	1.147.447.000	1 Dokumen	1.147.447.000	1 Dokumen	1.147.447.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	4.589.788.000		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	459.573.667	1 Dokumen	459.573.667	1 Dokumen	459.573.667	1 Dokumen	459.573.667	1 Dokumen	459.573.667	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.838.294.667		
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	428.714.286	1 Dokumen	428.714.286	1 Dokumen	428.714.286	1 Dokumen	428.714.286	1 Dokumen	428.714.286	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1.714.857.144		
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	180.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	140.000.000		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	779.090.526	1 Dokumen	779.090.526	1 Dokumen	779.090.526	1 Dokumen	779.090.526	1 Dokumen	779.090.526	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	3.116.362.104		
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.019.915.000	1 Dokumen	5.019.915.000	1 Dokumen	5.019.915.000	1 Dokumen	5.019.915.000	1 Dokumen	5.019.915.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	20.079.660.000		
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5.844.935.395	1 Dokumen	5.844.935.395	1 Dokumen	5.844.935.395	1 Dokumen	5.844.935.395	1 Dokumen	5.844.935.395	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	23.379.741.580		
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	507.573.558	1 Dokumen	507.573.558	1 Dokumen	507.573.558	1 Dokumen	507.573.558	1 Dokumen	507.573.558	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	2.030.294.232		
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Naik Tingkat di Kabupaten/Kota	81.164.000.000	3 Unit	811.640.000	3 Unit	811.640.000	3 Unit	811.640.000	3 Unit	811.640.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	3.246.560.000		
		1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1.014.992.000	1050 Keluarga	1.014.992.000	1050 Keluarga	1.014.992.000	1050 Keluarga	1.014.992.000	1050 Keluarga	1.014.992.000	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	4.059.968.000		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	85.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	85.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	400.00 Persen	340.000.000		
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	340.000.000		
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	539.606.150	100 Persen	539.606.150	100 Persen	539.606.150	100 Persen	539.606.150	100 Persen	539.606.150	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	2.158.424.600		
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	12.00 Unit	80.000.000		
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	494.606.150	3 Unit	494.606.150	3 Unit	494.606.150	3 Unit	494.606.150	3 Unit	494.606.150	0 Unit	-	0 Unit	-	12.00 Unit	1.978.424.600		
		1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	100.000.000		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3.162.000.000	80 Persen	3.162.000.000	90 Persen	3.162.000.000	95 Persen	3.162.000.000	100 Persen	3.162.000.000	Persen	-	Persen	-	Persen	12.648.000.000		
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di FKTP	3.162.000.000	90 Persen	3.162.000.000	95 Persen	3.162.000.000	100 Persen	3.162.000.000	100 Persen	3.162.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	12.648.000.000		
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 Tenaga Kesehatan	3.077.000.000	8 Orang	3.077.000.000	9 Orang	3.077.000.000	10 Orang	3.077.000.000	12 Orang	3.077.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	39.00 Orang	12.308.000.000		
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	340.000.000		
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pelaksanaan pelayanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan dan minuman	343.596.000	100 Persen	343.596.000	100 Persen	343.596.000	100 Persen	343.596.000	100 Persen	343.596.000	Persen	-	Persen	-	Persen	1.374.384.000		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Capaian Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000	80 Persen	20.000.000	85 Persen	20.000.000	90 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	355.00 Persen	80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 0		Tahun 0				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	80.000.000		
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Capaian Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.985.000	100 Persen	187.985.000	100 Persen	187.985.000	100 Persen	187.985.000	100 Persen	187.985.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	751.940.000		
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.985.000	1 Dokumen	187.985.000	1 Dokumen	187.985.000	1 Dokumen	187.985.000	1 Dokumen	187.985.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	751.940.000		
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		-		-		-		-		-		-		-		-		
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Capaian Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	135.611.000	75 Persen	135.611.000	85 Persen	135.611.000	90 Persen	135.611.000	100 Persen	135.611.000	0 Persen	-	0 Persen	-	350.00 Persen	542.444.000		
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	135.611.000	15 Unit	135.611.000	20 Unit	135.611.000	25 Unit	135.611.000	30 Unit	135.611.000	0 Unit	-	0 Unit	-	90.00 Unit	542.444.000		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	854.571.667	80 Persen	854.571.667	90 Persen	854.571.667	100 Persen	854.571.667	100 Persen	854.571.667	Persen	-	Persen	-	Persen	3.418.286.668		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	774.571.667	100 Persen	774.571.667	100 Persen	774.571.667	100 Persen	774.571.667	100 Persen	774.571.667	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	3.098.286.668		
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	774.571.667	12 Dokumen	774.571.667	12 Dokumen	774.571.667	12 Dokumen	774.571.667	12 Dokumen	774.571.667	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	3.098.286.668		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000	80 Persen	60.000.000	90 Persen	60.000.000	95 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	240.000.000		
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	240.000.000		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.000.000	80 Persen	20.000.000	90 Persen	20.000.000	95 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	80.000.000		
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	80.000.000		
							176.401.218.322		176.401.218.322		176.401.218.322		176.401.218.322		-		-	705.604.873.288			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	<b>RPD</b>							
1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,40	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65
	<b>Indikator Tujuan</b>							
1.	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,40	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65

3	Nilai Sakip	Kriteria	B	BB	BB	BB	BB	BB
	<b>Indikator Sasaran :</b>							
1	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.00 Kh	Per 100.000 Kh	399	300	200	100	50	50
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kh	Per 1000 Kh	4,5	4	3,5	3	2	2
4	Persentase Puskesmas Terakreditasi Naik Tingkat	Persen	-	-	-	-	100	100
5	Persentase Penurunan Stunting	Persen	-	16	14	13	10	10
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>							
1	Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelaksanaan pelayanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan dan minuman	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>	Persen	100	100	100	100	100	100
1	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan Capaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan	Persen	100	100	100	100	100	100

	Tunjangan ASN							
3	Persentase Capaian Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Capaian Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase capaian Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Capaian Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Capaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Persen	100	100	100	100	100	100

	dan dibayarkan Pajaknya							
13	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Unit Pelaksana yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan 80% Obat esensial di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Penanganan Balita Gizi kurang	Persen	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Capaian RumahSakit Kelas C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persen	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di FKTP	Persen	70	72	74	76	80	80
22	Persentase Capaian Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persen	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Capaian	Persen	100	100	100	100	100	100



	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
24	Persentase Capaian Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
26	Persentase Capaian Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Capaian Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persen	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2023-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 serta merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, UPT RSUD, UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Barito Selatan yang Maju, Mandiri, Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”.**